TINJAUAN *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DALAM PUTUSAN NO. 43/G/2019/PTUN.SRG

SKRIPSI

Oleh

Kevin Azzura Mylinda Handono

NIM: C94217085

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyāsah)

SURABAYA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Kevin Azzura Mylinda Handono
NIM	:	C94217085
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Fikih Siyāsah* Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2024

Saya yang menyatakan,



Kevin Azzura Mylinda Handono

NIM.C94217085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Kevin Azzura Mylinda Handono
NIM.	:	C94217085
Judul	:	Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 April 2024

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Kevin Azzura Mylinda Handono

NIM : C94217085

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV,

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 13 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kevin Azzura Mylinda Handono
NIM : C94217085
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : azzurakevin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/Ptun.Srg.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2026

Penulis

(Kevin Azzura Mylinda Handono)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Peneliitian ini berjudul Tinjauan *Fikih Siyāsah* Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG yang berusaha mengkaji problematika yang dimuat kedua rumusan masalah, diantaranya, bagaimana analisis pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG, dan kedua bagaimana tinjauan *fikih siyāsah* terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach.* Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS pada H. Dadang dalam putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG harus dibaca dalam konteks penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU ASN, tetapi apabila didasarkan pada terbitnya SKB 3 Menteri maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena berlaku surut. Dalam perspektif *fikih siyāsah* tindakan Walikota Tanggerang Selatan sebagai imam yang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang terbukti melakukan kejahatan jabatan dengan dasar yang berlaku surut merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan dan dapat diadukan kepada *wilayah al mazallim.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah PPK kembali menjatuhkan saksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada H. Dadang karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dengan dasar Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU ASN, dikaitkan dengan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017 PP Manajemen PNS. Kedua dalam perpsektif *fikih siyāsah* Imam sebagai pemimpin harus mendasarkan setiap perbuatannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat setiap kebijakan imam haruslah berorientasi kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kata Kunci : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, PNS, Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Penulisan 17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI *FIKIH SIYĀSAH* 19
A. Pengertian *Fikih Siyāsah* 19
B. Ruang Lingkup *Fikih Siyāsah* 22
C. Pengertian *Siyāsah Dusturiyyah* 26
D. *Wilayah al Mazallim* 32
BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DALAM PUTUSAN NO. 43/G/2019/PTUN.SRG 38
A. Kejahatan Jabatan 38
B. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 40
C. Kronologi Kasus dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG 48
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG 50

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV ANALISIS *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DALAM PUTUSAN NO. 43/G/2019/PTUN.SRG 59
A. Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG 59
B. Analisis *Fikih siyāsah* Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Dalam Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG ... 67
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia,* Jakarta : UI Press, 1995.

Hartani, Sri dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua* , Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Jaelani, Imam Amrusi, Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media grup, 2016.

Mawardi, Al, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah*, Mesir, dar al fikr,1996.

Nurcholis, Hanif, *Teori & Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta : Grasindo, 2007.

Pulungan Suyuti, *Fikih siyāsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Syarif, Mujar Ibnu, *Fikih siyāsah* Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

Triatmodjo, Sudibyo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Zainun, Buchori, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah,* Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990.

ARTIKEL/JURNAL

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, “Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Panorama Hukum,* Vol. 3, 2018.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, "Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hirarkio Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Jatiswara,* Vol 34 No 3, 2019.

SKRIPSI

Aisyah Nadila Ramadhanty, *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) kepada PNS Pelaku Tindak Pidana*,(Skripsi - Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).

Andi Harun Ansori, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera*, (Skripsi - Universitas Gunung Rinjani, Selong 2019).

Hibbi Rohmah Ilahiyyah, *Tinjauan Fikih siyāsah Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018*, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/